

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Jasa Hukum (Berita Negara Republik Indonesia No.1937)

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084)

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia No.15)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia No.470)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Sinar Grafika:Jakarta, 2011)

Agustan Leny & Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*, (Yogyakarta: UII Press, 2018)

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)

Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2004)

Andu Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 102

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016)

Dwi Hariyani, et.al, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)

Freddy Harris & Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017)

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008)

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minnesota: West Publishing & Co, 1991),

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas cet.6*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2001)

Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru : Witra Irzani, 2007)

Pung Karnantohadi, Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2020)

R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT.Intermasal, 2002)

R.A Emma Nurita, Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran,
(Bandung: Refika Aditama, 2019)

Sajipto Rahajo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)

Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan
Notaris, Bentuk dan Minuta Akta, (PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2016)

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam
Pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju , 2011)

Sjaifurahman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam
Pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju, 2016)

Soesilo Zauhar, Reformasi Administrasi: Konsep dimensi dan Strategi,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Ui Press,1984)

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH
Perdata), (Pradnya Paramita, Jakarta, 2003)

Subekti, Hukum Perjanjian, (Intermassa: Jakarta,1987)

Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2006)

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),
(Yogyakarta:Liberti, 1986)

Universitas Pelita Harapan, *Standart Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2025)

Jurnal

Anton Sudjarot, “Peran Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melaluisistem Online Single Submission”, *Fiat Iustitia:Jurnal Hukum*, Vol 3, No.1, September 2022. DOI: <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i1.2132>

Gabriella Tiku Sarungu, Disriani Latifah Sorindah,” Dampak Kekeliruan dalam Pemilihan Kode KBLI pada Akta Pendirian PT Bagi Notaris dan Pelaku Usaha”, *UNESA LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 3 Maret 2024. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Rifka Ramadhani Pawewang, Olga A. Pangkerego, dan Berlian Manopo,” Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP”, *Lex Privatum* Vol. IX, No. 4, April, 2021. DOI:

Reza Mulya Arum, “Kajian Yuridis Terhadap Pendirian Perseroan terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online”, *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol.8, 2023. DOI: <https://doi.org/10.35127/kabillah.v8i2.306>

R. La Porta “Investor Protection and Corporate governance”, *Jurnal Of financial Economics*, Vol 58, January, 2000. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00065-9](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00065-9)

Rosiana Rahmadani Sabrina, Aisyah Ayu Musyafah, “Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta”, NOTARIUS, Vol 17, No. 2, 2024. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.54095>

Siti Fauziah dan Dian Novita Sari, ”Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, LEX Renaissance , Vol. 3, No. 2, Juli 2018. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art10>

Tia Sanitra Gumilang, “Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4 No.1, Januari 2019. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art8>

Hasil Penelitian

Angga Nugraha Sihombing, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada Pt. Pln (Persero) Kitsumbagut”. Skripsi, Medan: Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2017

Iswar Danianto, “Peran Notaris Dalam Pendirian dan Pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Sistem Baru AHU *Online* dan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko”, Tesis, Semarang: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022

Shandy Handoko, “Peran Notaris Nany Angkasa, Sh., Sp.N Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”. Tesis, Jakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2024,

Website:

Astuti, “ Perbedaan KBLI Single Purpose dan KBLI Limiten Purpose Dalam OSS”, <https://lexmundus.com/articles/perbedaan-kbli-single-purpose-dan-kbli-limited-purpose-dalam-oss/>, di akses pada 26 Mei 2025

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, Diakses pada tanggal 14 Mei 2025

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, “Tingkat Risiko Kegiatan Usaha dalam OSS RBA”.
<https://dpmppt.bantulkab.go.id/web/berita/detail/551-tingkat-risiko-kegiatan-usaha-dalam-oss-rba#:~:text=Tingkat%20Risiko%20adalah%20potensi%20terjadinya,Tahun%202020%20tentang%20Cipta%20Kerja>, diakses pada 26 Mei 2025

Ditjen AHU Online, “Perseroan Terbatas”, <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>, diakses pada 19 Mei 2025

Ditjen AHU, “Pendirian Perseroan Terbatas”,
https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan, diakses pada 25 Mei 2025

Hukum Online, “Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-lt502201cc74649/>, diakses pada 7 Mei 2025

Lely Herlina, “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta”,
<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1906>, diakses pada 28 Mei 2025

Parta Ibeng, “Pengertian Preventif dan Represif, Contoh, Beserta Tujuannya”

<https://pendidikan.co.id/preventif-dan-represif/>, diakses pada 20 Mei 2025

